

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
7. Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Malang.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Malang.
10. Badan adalah Badan Daerah Kota Malang.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada:

- a. RKPD Tahun 2023; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk masing-masing Perangkat Daerah tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- l. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- o. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
- p. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- q. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- t. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;

- u. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- w. Rencana Kerja Kecamatan Klojen;
- x. Rencana Kerja Kecamatan Blimbing;
- y. Rencana Kerja Kecamatan Kedungkandang;
- z. Rencana Kerja Kecamatan Lowokwaru;
- aa. Rencana Kerja Kecamatan Sukun; dan
- bb. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi perubahan atas RKPD.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan/subkegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan/subkegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Agustus 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

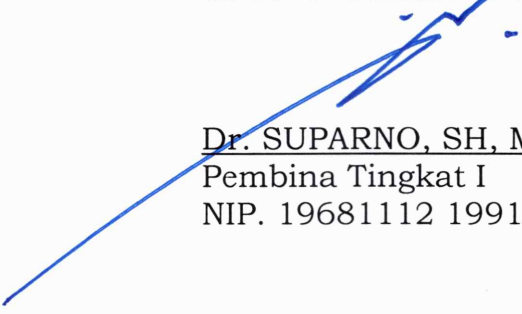
Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Agustus 2022
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

MULYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renja Perangkat Daerah tahun 2023 memuat kerangka kebijakan, kegiatan, sasaran, uraian program, kegiatan, sub kegiatan serta rencana indikatif pendanaanya yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam mengemban visi dan misi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD yaitu persiapan penyusunan Renja SKPD, penyusunan rancangan Renja SKPD, pelaksanaan forum SKPD, penetapan renja SKPD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen tertulis salah satunya yaitu Rencana Kerja (Renja). Dokumen tersebut ditulis dengan mengacu dan berpedoman kepada landasan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Malang.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2018-2023. Renja Tahun 2023 memuat penjabaran visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Malang pada tahun 2023.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana kerja sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Untuk mewujudkan visi kota Malang yaitu Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat maka penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Malang harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya

tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik kota Malang ini menggambarkan tujuan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun dan dalam penyusunannya diperlukan data atau dokumen yang meliputi : kebijakan pemerintah Pusat, Kebijakan pemerintah propinsi, kebijakan pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, perkembangan situasi global, regional maupun daerah, kinerja masa kini serta kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga diharapkan dalam penyusunan Rencana Kerja ini akan diperoleh suatu kegiatan yang partisipasif, transparan, komprehensif dan akuntabel mengingat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat;
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.
21. Peraturan Walikota Malang Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
22. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang RKPD Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2023, sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2023 adalah untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 dengan baik dan terkoordinasi, sesuai dengan tujuan masing-masing program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen Penyempurnaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dan pokok bahasan dalam penulisan Penyempurnaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undanganyang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran tabel

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:)

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan (Tabel T-C.33)

4.2 Tabel Pemetaan sesuai KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- d. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi sebesar 2355 surat dari target pada renstra 1000 surat
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terealisasi sebesar 1025 orang dari target pada renstra 900 orang
- 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:
- a. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Sub Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 95.27% dengan terealisasi sebesar 1534 orang, 250 orang dari target pada renstra sebesar 1565 orang , 250 orang. Penyebab tidak tercapainya adalah tidak seluruh peserta yang diundang mengikuti kegiatan
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- a. Progam Pelayanan Kesekretariatan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra

Pada bab ini, berisikan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Malang tahun lalu (2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.1.1 Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

a. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 95.27% dengan terealisasi sebesar 1534 orang, 250 orang dari target pada renstra sebesar 1565 orang , 250 orang.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- c. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

GA-1

Dengan tercapainya target program, maka kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dapat terpenuhi

b. Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dengan tercapainya target program, maka konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa dapat terselesaikan

c. Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Dengan tercapainya target program, maka penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi semakin meningkat

d. Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dengan tercapainya target program, maka persentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu semakin meningkat dan Ormas dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, maka pada tahun 2023 perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja kegiatan untuk mendukung capaian program.

42

Berikut disajikan matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022.

Tabel 2.2. (TC – 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-						

bb. II - 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	-	100%	100%		100%	62.50%	63%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	-	16 dokumen	16 dokumen	100.00%	100%	62.50%	63%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	0	0%

bb. II - 7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	15 dokumen	-	15 dokumen	15 dokumen	100.00%	15 dokumen	10 dokumen	67%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	-	28 Pegawai	28 Pegawai	100.00%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	28 Pegawai	-	28 Pegawai	28 Pegawai	100.00%	28 Pegawai	28 Pegawai	100%
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	-	80%			80%	47.22%	59%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	-	10 dokumen	10 dokumen	100.00%	100%	0%	0%

bb. II - 8

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	10 dokumen	-	10 dokumen	10 dokumen	100.00%	10 dokumen	0	0%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	-	12 jenis	12 jenis	100.00%	100%	41.67%	42%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	12 jenis	-	12 jenis	12 jenis	100.00%	12 jenis	5 jenis	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	-	13 unit	13 unit	100.00%	100%	100%	100%

GK-1

bb. II - 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	13 unit	-	13 unit	13 unit	100.00%	13 unit	13 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	19 jenis	-	19 jenis	19 jenis	100.00%	19 jenis	0	0%
		Nilai survei kepuasan internal	80	-	85.35			80	0	0.00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	-	28 orang	28 orang	100.00%	0%	0%	0%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	28 orang	-	28 orang	28 orang	100.00%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Undangan									
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	-	104 eksemplar	104 eksemplar	100.00%	100%	50%	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	104 eksemplar	-	104 eksemplar	104 eksemplar	100.00%	104 eksemplar	52 eksemplar	50%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	152 OH	-	152 OH	150 OH	98.68%	152 OH	72 OH	47.37%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	-	1000 surat	2355 surat	235.50%	100%	122.80%	123%

bb. II - 11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1000 surat	-	1000 surat	2355 surat	235.50%	1000 surat	1288 surat	128.80%
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	6 bulan	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	2050 m2	-	2050 m2	2050 m2	100.00%	2050 m2	2050 m2	100%
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	13%	-	11%	12.53%	113.91%	12.00%	3.60%	27.69%

bb. II - 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta	900 orang	-	900 orang	1025 org	113.89%	900 orang	270 orang	30.00%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pertemuan	900 orang	-	900 orang	1025 org	113.89%	900 orang	270 orang	30.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	75%	-	70.00%	68.80%	98.29%	72.50%	8.26%	11.01%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah peserta	1815 orang	-	1815 orang	1784 org	98.29%	1815 orang	150 orang	8.26%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	jumlah peserta pertemuan, jumlah peserta rakor	1565 orang , 250 orang	-	1565 orang , 250 orang	1534 orang, 250 orang	98.29%	1565 orang , 250 orang	150 orang	8.26%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	75%	-	70%	70%	100.00%	72.50%	72.50%	96.67%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah peserta	100 org, 200 org	-	100 org, 200 org	100 org, 200 org	100.00%	100 org, 200 org	100 org, 200 org	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-jumlah personil pemantau, personil wasdin, personil FKDM, personil KPRM, personil Timdu konflik sosial, personil Forkopimda -jumlah peserta rakor, sosialisasi, pembekalan, FGD	100 org, 200 org	-	100 org, 200 org	100 org, 200 org	100.00%	100 org, 200 org	100 org, 200 org	100.00%

bb. II - 16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	60%	-	55%	55%	100.00%	57.50%	28.75%	47.92%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah parpol	10 parpol	-	10 Parpol	10 Parpol	100.00%	10 parpol	5 parpol	50.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Parpol Penerima Hibah	10 Parpol	-	10 Parpol	10 Parpol	100.00%	10 parpol	5 parpol	50.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah pelaku sosialisasi	200 orang, 2 kali	-	150 orang, 2 kali	150 orang, 2 kali	100.00%	150 orang	300 org	150.00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	35%	-	30%	30%	100.00%	32.50%	32.50%	92.86%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) s.d triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah ormas yg terdata	120 ormas	-	100 ormas	100 ormas	100.00%	120 ormas	120 ormas	100.00%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yg terdata	120 ormas	-	100 ormas	100 ormas	100.00%	120 ormas	120 ormas	100.00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi sesuai dengan urusan dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai tolok ukur yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok fungsi. Indikator sasaran ini dirumuskan berdasarkan:

1. analisis terhadap Indikator Kinerja dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria);
2. analisis terhadap Indikator Kinerja dalam SPM;
3. analisis terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai PP Nomor 6 tahun 2008;
4. dan mengacu pada Lampiran T-A1 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah;
5. isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi;
6. evaluasi pelaksanaan renstra/renja tahun sebelumnya

Berdasarkan penetapan kinerja / rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang memiliki 3 (tiga) indikator sasaran rencana kerja yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa
- b. Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan
- c. Nilai Sakip

Tabel 2.3. (TC – 30) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bakesbangpol tidak memiliki SPM/ Standar Nasional dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) sehingga untuk menentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang akan di uji menggunakan indikator pada Renstra

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa	-	-	67.5%	70%	72.5%	75%	67.5%	69.43%			
2	Persentase Peningkatan Partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam Pembangunan	-	-	40%	42.50%	45%	47.5%	40%	42.50%			
3	Nilai Sakip	-	-	80.5	82.05	83.5	84.9	77.49	83.92			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan dan bela negara.
- b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan, konflik antar golongan, dan kerusakan yg bermotif SARA dimasyarakat.
- c. Belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kehidupan politik dan organisasi kemasyarakatan, serta dalam peningkatan implementasi HAM.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Berikut adalah tabel review rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.

Tabel 2.4. (TC – 31) *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023*
Kota Malang

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Langsung				54,059,314,513	Belanja Langsung			54,059,314,513	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,272,247,045	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,359,507,045	
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai kebutuhan	100%	130,233,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai kebutuhan	100%	130,233,000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	40,601,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	40,601,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	89,632,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	89,632,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	4,239,503,833	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	4,294,423,833	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4,239,503,833	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4,294,423,833	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	4,420,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	4,420,000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	4,420,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	4,420,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	83,960,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	83,960,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	83,960,000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	83,960,000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	421,810,500	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	421,810,500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	344,960,500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	344,960,500	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	76,850,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	76,850,000	
			Nilai survei kepuasan internal	80			Nilai survei kepuasan internal	80		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	806,089,304	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	806,089,304	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	104 Dokumen	34,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	104 Dokumen	34,000,000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152 Laporan	772,089,304	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152 Laporan	772,089,304	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	586,230,408	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	618,570,408	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	91,163,200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	91,163,200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111,014,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111,014,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	384,053,208	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	416,393,208	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	13%	709,559,200	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	13%	809,559,200	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta	900 orang	709,559,200	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta	900 orang	809,559,200	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 orang	709,559,200	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 orang	809,559,200	
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan		Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	75%	898,761,896	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	75%	1,048,761,896	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama			EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		jumlah peserta	1815 orang	898,761,896	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah peserta	1815 orang	1,048,761,896	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1815 Orang	898,761,896	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1815 Orang	1,048,761,896	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	75%	3,715,569,000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	75%	3,424,509,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		jumlah peserta	2272 Orang	3,715,569,000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah peserta	2272 Orang	3,424,509,000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2272 Orang	3,715,569,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2272 Orang	3,424,509,000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	60%	42,082,716,960	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	60%	42,036,516,960	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		jumlah parpol	10 Orang	42,082,716,960	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah parpol	10 Orang	42,036,516,960	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	41,308,536,960	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	41,308,536,960	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	150 Orang	774,180,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	150 Orang	727,980,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	35%	380,460,412	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	35%	380,460,412	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		jumlah ormas yg terdata	70 ormas	380,460,412	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah ormas yg terdata	70 ormas	380,460,412	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	380,460,412	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	380,460,412	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Forum perangkat daerah diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Dari forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dimaksud ada beberapa masukan/saran Usulan Musrenbang dan Pokir untuk dilaksanakan oleh Bakesbangpol, berikut ini adalah musrenbang dan pokir yang akan di akomodir pada Tahun 2023.

Tabel 2.5. (TC – 32)Usulan Program dan Kegiatan (Tematik) dan Pokir dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Malang

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

No.	Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Kurang nya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan)	PKK Kelurahan Oro-oro Dowo, Jl. Kunir 9A Malang, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Klojen
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Penguatan Nilai Pancasila untuk RT, RW dan Karang Taruna)	PEMBUMIAN NILAI PANCASILA Balai RW 1 Jl. Aris Munandar 5 RW 01, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Klojen
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Penambahan wawasan)	PEMBUMIAN PANCASILA Jl. Prof. Moch. Yamin RT 07 RW 06, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Klojen

bb. II - 33

No.	Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Wawasan untuk Pemuda Pemudi)	Karangtaruna - Kelurahan Klojen, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Klojen
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Penambahan wawasan)	PEMBUMIAN NILAI PANCASILA Karang Taruna Kelurahan Sukoharjo Jl. Aris Munandar No. 54, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Klojen
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Perlunya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan)	Jl. Galunggung 5, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Klojen
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Keamanan Bangsa dan Negara)	RW 10, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Klojen
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Menumbuhkan wawasan ideologi kebangsaan bagi para Ketua RW dan RT)	KETUA RT RW, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Klojen
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	KARANG TARUNA Jl. Puncak Buring Indah No.1 (Kantor Kelurahan Buring), Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Kedungkandang
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan, Kota Malang	jumlah peserta	20 orang	10,000,000	Musrenbang Kedungkandang
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jl. Raya Cemorokandang No. 1, Kota Malang	jumlah peserta	10 orang	5,000,000	Musrenbang Kedungkandang

No.	Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Meningkatkan implementasi nilai nilai Pancasila dan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi setiap warga masyarakat)	Kelurahan Blimbing Jl. Tenaga Utara No. 1, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Blimbing
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Perlunya pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat)	Karang TarunaKelurahan Kesatrian, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Blimbing
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Peningkatan Kapasitas dan minat baca pada anak-anak)	Mulyorejo, Kota Malang	jumlah peserta	10 orang	5,000,000	Musrenbang Sukun
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Meningkatkan kompetensi dan kinerja serta sosial masyarakat untuk lembaga di Kelurahan)	Kelurahan Bakalankrajan, Kota Malang	jumlah peserta	10 orang	5,000,000	Musrenbang Sukun
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Menurunnya nilai kerukunan dan kesadaran bela negara)	TP PKK Tlogomas, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	40,000,000	Musrenbang Lowokwaru
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Menurunnya nilai kerukunan dan kesadaran bela negara)	Karang Taruna, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Lowokwaru

No.	Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Menurunnya Pemahaman nilai nilai Pancasila)	Jl. Simbar Menjangan 37, Kota Malan	jumlah peserta	10 orang	5,000,000	Musrenbang Lowokwaru
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Musrenbang Pemuda : paham radikalisme dan intoleransi sudah banyak masuk di ranah pendidikan)	Kumis Kucing No. 19 RT 04/RW 02 Kelurahan Jatimulyo Kec. Lowokwaru (Duta Damai), Kota Malang	jumlah peserta	10 orang	5,000,000	Musrenbang Pemuda
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (MUSRENBANG PEMUDA : Perlunya penguatan kapasitas anggota dalam wawasan kebangsaan)	Jl. KH. Hasyim Asyari 21 (FATAYAT), Kota Malang	jumlah peserta	10 orang	5,000,000	Musrenbang Pemuda
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Musrenbang Pemuda : Kurangnya kesadaran bernegara dan pengamalan Pancasila)	Perum Pesona Sigura Gura Kav. 12, Merjosari, Lowokwaru Malang (Gema Keadilan), Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Pemuda
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (MUSRENBANG PEMUDA : Menjamurnya berita hoax pada sosial media membuat banyak kalangan pemuda yang mulai tergerus rasa cinta tanah air terhadap negaranya, serta bermunculan organisasi yang menggerus nilai-nilai nasionalisme)	Jl. K.H. Hasyim Ashari No 21, Kauman, Klojen, Kota Malang (IPNU), Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Pemuda

No.	Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Musrenbang Pemuda : Menjamurnya berita hoax pada sosial media membuat banyak kalangan pemuda yang mulai tergerus rasa cinta tanah air terhadap negaramya, serta bermunculan organisasi yang menggerus nilai-nilai nasionalisme)	Jl. K.H. Hasyim Ashari No 21, Kauman, Klojen, Kota Malang (IPPNU), Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Pemuda
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Musrenbang Pemuda : Banyak santri pondok yang hanya faham ilmu materi agama di pondok pesantren akan tetapi kurang mendapatkan wawasan kebangsaan dan bela negara)	Sekretariat DPD LDII Kota Malang. Jl. S. Supriadi XI No.21 RT. 06 RW.04 Kel. Sukun Kec.Sukun (LDII), Kota Malang	jumlah peserta	10 orang	5,000,000	Musrenbang Pemuda
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Musrenbang Pemuda : Pentingnya memiliki pengetahuan tentang Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan)	Jl. Danau Limboto, Keduyo, Mangliawan, Malang (MMBI), Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Pemuda

No.	Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Musrenbang Pemuda : Semakin menurunnya nilai nilai Pancasila yang dipahami oleh para anak muda millenial saat ini harus segera ditanggulangi)	Jl. Kh Malik Dalam Kedung Kandang, Malang (Pemuda Panca Marga), Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Pemuda
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (MUSREN PEMUDA : Banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan Pembumian Nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat termasuk anggota dari GMNI MALANG)	Jl. Supriadi no 24 Kec. Sukun Kota Malang (GMNI), Kota Malang	jumlah peserta	3 orang	1,500,000	Musrenbang Pemuda
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (musrenbang pemuda : Kurangnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda akan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan)	Jl. Wisnuwardhana Gg. Air Das No. 1 Telp. 081233560009 Malang 65139 (pemuda demokrat), Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Pemuda

No.	Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Musrenbang Pemuda : Banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan Pembumian Nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat termasuk anggota dari Malang Hijau)	Jl. Sidomulyo 2 No. 18 Rt 03 Rw 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang (Malang Hijau), Kota Malang	jumlah peserta	3 orang	1,500,000	Musrenbang Pemuda
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jl.Kyai Parseh Jaya Gang.Sawi No.25 RT.03 RW.01, Kota Malang	jumlah peserta	10 orang	5,000,000	Musrenbang Anak
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Musrenbang Lansia Kurangnya penguasaan Anggota DHC BPK 45 tentang cara berkomunikasi dalam rangka mensosialisasikan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Juang 45)	Sekretariat DHC BPK 45 Kota Malang, Kota Malang	jumlah peserta	5 orang	2,500,000	Musrenbang Lansia
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Musren Perempuan WCC Dian Mutiara: Perlunya peningkatan kapasitas pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis masyarakat	jumlah peserta	10 orang	5,000,000	Musrenbang Perempuan
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (kurangnya pemahaman tentang wasbang)	Jl. Ketapang No.2, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang	jumlah peserta	100 Orang	30,000,000	Pokir (Fraksi PKB)

bb. II - 39

No.	Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Perlunya bekal nilai-nilai Pancasila bagi para generasi penerus bangsa)	Pengurus RT, RW dan Ormas di Seluruh Kota Malang, Kota Malang	jumlah peserta	110 Orang	30,000,000	Pokir (Fraksi PKS)
JUMLAH						205,500,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Prioritas Nasional Bakesbangpol pada Tahun 2023 yaitu:

a) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Untuk mencapai prioritas tersebut diwujudkan melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Hal ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan nilai-nilai Pancasila pada aparat dan seluruh masyarakat serta memfasilitasi silaturahmi dan komunikasi antar suku, etnis dan golongan serta pendidikan dan latihan tentang bela Negara, memfasilitasi pengembangan pendidikan politik bagi masyarakat dan mengaktifkan seluruh komponen masyarakat untuk berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

b) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mencapai prioritas tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Hal ini dilakukan dengan cara membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan membentuk Tim Terpadu dan Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kota Malang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 2018-2023. Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat daerah selama lima tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2023.

Dari rumusan visi dan misi RPJMD Kota Malang 2018-2023 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 2018-2023 tersebut, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (target) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan:

Tujuan Bakesbangpol Kota Malang adalah: "Terwujudnya Kondusivitas Lingkungan Sosial"

- Indikator: Persentase penyelesaian kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial
- a. Sasaran
 - Sasaran yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tujuan tersebut yakni :
 - i. Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa
Indikator :
 - a. Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa
 - ii. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan
 - Indikator :
 - b. Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan
 - iii. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
 - Indikator : Nilai Sakip

a. Program dan kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Bakesbangpol harus selalu mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas.
 - a. Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa, dapat dihitung melalui tercapainya Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - b. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan, dapat tercapai melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program yaitu 6 program, 12 kegiatan, dan 18 sub kegiatan
 - b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif Rp. 54.059.314.513
- c. Rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1. (TC – 33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Malang

Perangkat Daerah :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
										Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											54,059,314,513	APBD					59,465,245,964
											54,059,314,513	APBD					59,465,245,964
											54,059,314,513	APBD					59,465,245,964
											54,059,314,513	APBD					59,465,245,964
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai Evaluasi Sakip	84.9														
											6,359,507,045						6,995,457,750

bb. IV - 2

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		APBD				100%	-
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai kebutuhan	100%	130,233,000	APBD		Kota Malang		100%	143,256,300
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	40,601,000	APBD		Kota Malang		1 dokumen	44,661,100
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	89,632,000	APBD		Kota Malang		15 dokumen	98,595,200
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	4,294,423,833	APBD		Kota Malang		100%	4,723,866,216

bb. IV - 3

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4,294,423,833	APBD		Kota Malang		28 Orang/bulan	4,723,866,216
						Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%						80%	-
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	4,420,000	APBD		Kota Malang		100%	4,862,000
					Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	4,420,000	APBD		Kota Malang		10 Laporan	4,862,000
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	83,960,000	APBD				100%	92,356,000
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	83,960,000	APBD		Kota Malang		12 Unit	92,356,000

bb. IV - 4

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	421,810,500	APBD		Kota Malang		100%	463,991,550
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	344,960,500	APBD		Kota Malang		13 unit	379,456,550
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	76,850,000	APBD		Kota Malang		19 Unit	84,535,000
						Nilai survei kepuasan internal	80						80	-
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	806,089,304	APBD				100%	886,698,234
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	104 Dokumen	34,000,000	APBD		Kota Malang		104 Dokumen	37,400,000

bb. IV - 5

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152 Laporan	772,089,304	APBD		Kota Malang		152 Laporan	849,298,234
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	618,570,408	APBD				100%	680,427,449
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	91,163,200	APBD		Kota Malang		1000 Laporan	100,279,520
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111,014,000	APBD		Kota Malang		12 Laporan	122,115,400
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	416,393,208	APBD				1 Laporan	458,032,529
Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa	Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa	Jumlah kejadian yang terselesaikan dibagi seluruh kejadian	75%						APBD					-

bb. IV - 6

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dikali seratus persen												
					PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	13%	809,559,200	APBD		Kota Malang		13%	890,515,120
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta	900 orang	809,559,200	APBD				900 orang	890,515,120
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 orang	809,559,200	APBD		Kota Malang		900 orang	890,515,120

bb. IV - 7

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah kejadian gangguan ketertiban/ konflik sosial yang terselesaikan dibagi kejadian gangguan ketertiban/ konflik sosial dikali seratus persen			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	75%	1,048,761,896	APBD				75%	1,153,638,086
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah peserta	1815 orang	1,048,761,896	APBD				1815 orang	1,153,638,086
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	1815 Orang	1,048,761,896	APBD		Kota Malang		1815 Orang	1,153,638,086

bb. IV - 8

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
										Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Penghayat Kepercayaan di Daerah								
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	75%	3,424,509,000	APBD			75%	3,766,959,900
									Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah peserta	2272 Orang	3,424,509,000	APBD			2272 Orang	3,766,959,900
									Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	2272 Orang	3,424,509,000	APBD	Kota Malang		2272 Orang	3,766,959,900

bb. IV - 9

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan		47,5%						APBD					-
		Jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah daftar pemilih tetap dikali seratus persen				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	60%	42,036,516,960	APBD	Kota Malang	60%	46,240,168,656	

Handwritten signature

bb. IV - 10

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah parpol	10 parpol	42,036,516,960	APBD				10 parpol	46,240,168,656

bb. IV - 11

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	41,308,536,960	APBD		Kota Malang		10 Orang	45,439,390,656

bb. IV - 12

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	727,980,000	APBD				150 Orang	800,778,000
		Jumlah Ormas yang terdaftar dan berperan aktif dalam pembangunan dibagi jumlah Ormas terdata dikali seratus persen			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	35%	380,460,412	APBD				35%	418,506,453

bb. IV - 13

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Desa/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah ormas yg terdata	120 Orang	380,460,412	APBD				120 Orang	418,506,453
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	380,460,412	APBD				120 Orang	418,506,453

TABEL 4.2 PEMETAAN SUB KEGIATAN SESUAI KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	8.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	1	dokumen	8.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	1	Dokumen
2	8.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	15	dokumen	8.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Dokumen
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3	8.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	28	Pegawai	8.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang/bulan
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
4	8.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	10	dokumen	8.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	8.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	12	jenis	8.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6	8.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	13	unit	8.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit
7	8.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	19	jenis	8.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	Unit
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
8	8.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	104	eksemplar	8.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	104	Dokumen
9	8.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	152	OH	8.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152	Laporan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
10	8.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1000	surat	8.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	Laporan

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	8.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12	bulan	8.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
12	8.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	2050	m2	8.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
13	8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pertemuan	900	orang	8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900	Orang
		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	8.01.05.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah dokumen	1	dokumen	8.01.05.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1815	Orang
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	8.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-jumlah personil pemantau, personil wasdin, personil FKDM, personil KPRM, personil Timdu konflik sosial, personil Forkopimda -jumlah peserta rakor, sosialisasi, pembekalan, FGD	1617 , 655	orang, orang	8.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2272	Orang
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	8.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Parpol Penerima Hibah	10	Parpol	8.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	Orang
17	8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah pelaku sosialisasi	150	orang	8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150	Orang

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
18	8.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yg terdata	120	ormas	8.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120	Orang

BAB V
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini meliputi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana program ini pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya bidang politik dan keamanan di Kota Malang. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pembangunan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan yaitu:
 1. Renja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Bakesbangpol
 2. Bakesbangpol berkewajiban menjamin konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra
 3. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bakesbangpol sangat tergantung dari peran seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya
- c. Rencana tindak lanjut
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2023, Bakesbangpol berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen Renja Bakesbangpol Tahun 2023

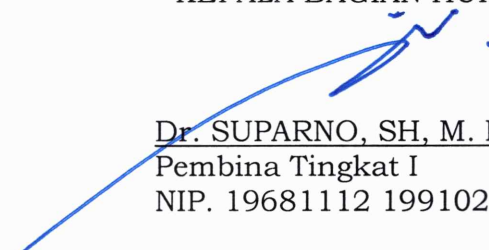
BAB V
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini meliputi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana program ini pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya bidang politik dan keamanan di Kota Malang. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pembangunan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan yaitu:
 1. Renja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Bakesbangpol
 2. Bakesbangpol berkewajiban menjamin konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra
 3. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bakesbangpol sangat tergantung dari peran seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya
- c. Rencana tindak lanjut
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2023, Bakesbangpol berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen Renja Bakesbangpol Tahun 2023.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI